



Aset Sumber Temuan

PONTIANAK - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hingga semester II Tahun 2012 meningkat dibandingkan Semester I pada tahun yang sama.

"Sampai semester dua tersebut, menghasilkan 2.976 temuan. Mengalami penambahan sebanyak 175 temuan dari semester satu," ujar Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar Adi Sutidyo, sesuai penyerahan laporan hasil pemantauan TLRHP per 31 Desember 2012 dan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2012, Jumat (5/4).

Tak hanya temuan, rekamendasi BPK pada periode sama juga mengalami penambahan sebanyak 397 rekomendasi, sehingga menjadi 6.306 rekomendasi. Adi menjelaskan, peningkatan terjadi karena adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada semester II tersebut.

Dari rekomendasi yang diberikan BPK, sebanyak 3.975 rekomendasi atau 63,04 persen tindak lanjutnya sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan 1.799 rekomendasi atau 28,53 persen belum sesuai dengan rekomendasi, dan 532 rekomendasi atau 8,44 persen belum tindak lanjut.

"Berdasarkan progres yang ada pada kami, pemerintah daerah di Kalbar menunjukkan usahakeras untuk mendaklanjuti rekomendasi dan menghasilkan capaian cukup signifikan," ungkap Adi.

Dalam kesempatan yang sama, BPK RI Perwakilan Kalbar juga menyerahkan laporan hasil pemantauan atas kerugian negara atau daerah semester II Tahun 2012.



Aset Sumber Temuan

Sambungan dari halaman 9

Pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan daerah pada instansi yang dipantau maupun status penyelesaiannya. Pemantauan diantaranya dilakukan pada kasus yang telah ditetapkan surat keputusan pembebanannya, kasus yang dalam proses penyelesaian pembebanan, maupun kasus berupa informasi kerugian daerah namun belum diproses penyelesaian kerugiannya.

"Saat ini Tim BPK RI juga sedang melaksanakan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2012," kata Adi, yang berharap pemerintah daerah dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan tersebut.

Adi menambahkan hingga saat ini hanya delapan kabupaten kota dan pemerintah provinsi yang telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2012. Daerah yang belum menyerahkan yakni Singkawang, Landak, Sekadau, Kapuas Hulu, Kayong Utara, dan Melawi.

Wali Kota Pontianak Sutarnidji mengungkapkan sebagian besar temuan di Pemerintah Kota Pontianak telah diselesaikan. "Ada temuan tahun 2000, 2001, masalah PDAM selesai. Sebagian (temuan) sudah selesai," ujar Sutarnidji, kemarin. Ia menjelaskan temuan paling besar ada pada tahun 2006, 2007, dan 2008, yakni masalah bantuan sosial. Tetapi perlahan akan diselesaikan.

"Kemarin ada yang sudah mengembalikan Rp2 miliar. Untuk tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 hampir tidak ada temuan," ujar Sutarnidji yang enggan menyebutkan sosok yang mengembalikan dana bansos tersebut.

Bupati Sanggau Setiman H. Sudin menuturkan temuan lama di wilayahnya sulit ditindaklanjuti. Karena berhubungan dengan pihak-pihak yang menjabat ketika itu. "Tetapi kami sebagai penerus tetap berupaya maksimal untuk menyelesaikan temuan yang lama," katanya.

Kendala lain terkait temuan BPK, lanjut Setiman, satuan kerja perangkat daerah belum dilengkapi sumber daya manusia yang andal. Belum ada auditor dengan klasifikasi teknologi dan informasi. "Masih perlu bimbingan BPK," katanya.

Ia menambahkan aset juga menjadi sumber temuan. "Ada beberapa aset penda bersertifikat, dibuat lagi dengan sertifikat lain," katanya. (uni)

• ke halaman 15 kolom 1